

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2018**

Sanusi Ariyanto

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau

Email : sanusiaryanto2@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dampak penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 30 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas dan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan *SPSS*. Hasil penelitian menunjukkan: (1) penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2017. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik tingkat penerapan SAP yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan, maka akan berdampak positif pada peningkatan kualitas laporan keuangan; (2) kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017. Semakin tinggi kompetensi SDM yang dimiliki seperti tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan cenderung semakin baik.

Kata kunci: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan.

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, dimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 menerapkan akuntansi pemerintahan Penerapan berbasis akrual murni. Dimana pelaksanaan akrual murni paling tidak harus diterapkan paling lambat empat (4) tahun setelah peraturan ini diterbitkan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah mendapat Opini dari BPK Wilayah Riau wajar tanpa pengecualian sejak tahun 2012 –

2018 dengan beberapa catatan yaitu masalah persediaan obat di RSUD dan Masalah Pekerjaan Dalam Proses Pada Proyek Multiyear.

Penelitian yang menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan Susilawati dan Riana (2014) yang menyatakan bahwa SAP berpengaruh positif terhadap laporan keuangan daerah, lain halnya dengan penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa penerapan SAP memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap laporan keuangan daerah.

Selain itu, hal yang mendasar

dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah manfaat penerapan SAP. Berdasarkan SAP daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan SAP. Penerapan Akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah Sistem Akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 21 Tahun 2011).

SAKD adalah sistem informasi yang membantu proses pencatatan dan pelaporan anggaran dan keuangan daerah. Menurut Halim (2008) Akuntansi Keuangan Daerah dapat didefinisikan sebagai Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Harus disadari bahwa terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan informasi laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi dalam laporan keuangan harus berkualitas dan informasi dalam laporan keuangan yang akan dipublikasikan tersebut harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak

menyesatkan para penggunanya, laporan keuangan hanya akan bermanfaat jika laporan keuangan yang diinformasikan disajikan dengan valid dan dapat diandalkan. Jika laporan keuangan yang dipublikasikan buruk, artinya laporan keuangan tersebut dihasilkan dari sistem akuntansi yang buruk sehingga didalamnya mengandung kesalahan yang material dalam penyajian, tidak disusun sesuai dengan standar pelaporan, dan tidak tepat waktu dalam penyampainnya maka hal itu akan berdampak buruk bagi para pengguna laporan dan pihak penyaji laporan itu sendiri (Mahmudi, 2010: 9).

Pada prinsipnya SAP daerah bisa berupa sistem akuntansi maupun berkomputerisasi. Jika pemerintah daerah sudah menggunakan sistem akuntansi berkomputerisasi, maka beberapa tahap dalam siklus akuntansi bisa digantikan oleh komputer. Dengan demikian, apabila pemerintah tersebut menggunakan sistem akuntansi berkomputerisasi maka akan sangat menghemat waktu dan tenaga, informasi laporan keuangan yang dihasilkannya pun akan lebih tepat waktu, lebih bervariasi, dan akan lebih berkualitas. (Mahmudi, 2010: 27).

Keberadaan sebuah sistem akuntansi menjadi sangat penting karena fungsinya dalam menentukan kualitas informasi pada laporan keuangan. mengungkapkan bahwa jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan. Sistem akuntansi memberikan pengetahuan tentang pengolahan informasi akuntansi sejak

data direkam dalam dokumen sampai dengan laporan yang dihasilkan.

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer. Namun mengingat sumber daya manusia yang masih sangat minim yang berspesialisasi di bidang akuntansi khususnya akuntansi keuangan sektor publik maka akan lebih tepat jika menggunakan sistem aplikasi computer yang komprehensif dan sudah teruji. Hal ini akan dapat meminimalkan kesalahan proses akuntansi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan laporan keuangan yang diperlukan publik secara akurat, relevan, dan tepat waktu. Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan Mardiasmo (2009) bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal.

Penelitian yang dilakukan Ihsanti (2014) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, lain halnya dengan penelitian yang dilakukan Botituhe (2012) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Untuk dapat menghasilkan laporan

keuangan yang berkualitas, maka kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkompetensi dibutuhkan SDM yang berlatar belakang atau memahami bidang akuntansi dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan, begitu pula sebaliknya, apabila bidang akuntansi diisi oleh SDM yang tidak berkompetensi di bidang akuntansi dapat menjadi pengaruh kurangnya pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar.

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. (Indriasari, et al. 2008) kompetensi merupakan suatu karakteristik seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan.

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes).

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan,

dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sitem akuntansi, sumber daya yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

Emilda Ihsanti (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, lain halnya dengan penelitian yang dilakukan Sukmaningrum (2012) menyatakan bahwa kompetensi sumberdaya manusia tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan? 2) Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Untuk menguji pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 2) Untuk menguji pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

TELAAH PUSTAKA

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat

digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau diubah kealam konteks yang memberikan makna.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk

- membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, definisi Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

SAP Terdiri dari beberapa standar yaitu

1. SAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
2. SAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
3. SAP 03 Laporan Arus Kas
4. SAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan
5. SAP 05 Akuntansi Persediaan
6. SAP 06 Akuntansi Investasi
7. SAP 07 Akuntansi Aset Tetap
8. SAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.

9. Akuntansi Kewajiban
10. Koreksi Kesalahan, Perubahan estimasi Akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan
11. Laporan Keuangan Konsolidasian
12. Laporan Operasional

SAP merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pengertian akuntansi sebagaimana dikemukakan oleh Accounting Principle Board (APB) yang memandang akuntansi dari sudut fungsinya sebagai berikut : “Akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif tindakan. Akuntansi meliputi beberapa cabang, antara lain akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan akuntansi pemerintahan” (Halim, 2012).

Akuntansi menyediakan informasi yang kuantitatif yang bersifat keuangan, dengan demikian output akuntansi adalah informasi keuangan. Informasi keuangan tersebut lebih dikenal dalam bentuk laporan keuangan. Informasi dari akuntansi keuangan daerah tentu saja digunakan

oleh Pemerintah Daerah sendiri (*internal*), juga oleh pihak di luar Pemda (*external*), seperti DPRD, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Pusat dan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan.

Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi. Organisasi bebas merancang dan menerapkan berbagai prosedur yang diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi karena informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi telah diatur dalam standar akuntansi maka organisasi harus merancang sistem akuntansinya yang dapat menghasilkan laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam standar akuntansi untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan standar akuntansi.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Moheriyanto (2012) Kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu.

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan

keuangan pemerintah di Indonesia.

Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan mempunyai pilihan dua basis, yaitu SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. Penerapan SAP berbasis akrual dalam lingkungan pemerintahan adalah untuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan untuk kepentingan publik, serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Dengan adanya SAP berbasis akrual ini dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami untuk pengambilan suatu keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik.

Suatu pemerintahan yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan dalam lingkungan pemerintahan. Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan agar semuanya berjalan dengan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat terutama laporan keuangan yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan untuk dipertanggungjawabannya.

H1: Diduga penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Daerah

Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam

memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

Selain itu, hal yang mendasar mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah manfaat Penerapan Sistem Akuntansi Daerah berdasarkan standart akuntansi pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Penerapan Akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah Sistem Akuntansi.

Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 21 Tahun 2011).

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas dibutuhkan

SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan

organisasional tentang pemerintahan. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

SDM merupakan human capital di dalam organisasi. Human capital merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan economic rent. Human capital merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan yang dengan human capital tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi.

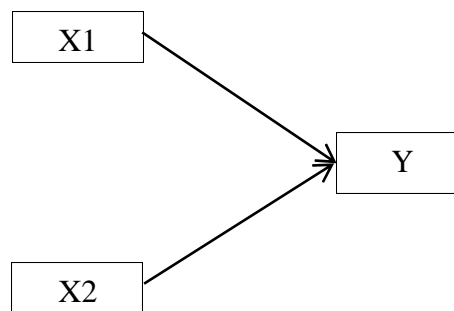
SDM merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi SDM yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan PEMDA.

H2: Diduga kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Model Penelitian

Berikut ini adalah model penelitian dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen:

Gambar 1
Model Penelitian



Sumber: *Data Olahan, 2017.*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan terhadap pegawai yang bekerja pada SKPD Kabupaten Pelalawan. Pensampelan atas responden dilakukan secara purposive. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi dalam menyusun laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Pelalawan. Untuk Kabupaten Pelalawan saat ini Penyusunan Laporan keuangan masih terfokus pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah dibantu bagian pada Sekretariat Daerah. Kriteria ini didasarkan petunjuk dan arahan Sekretaris Daerah karena keterbatasan Sumber Daya Manusi maka untuk pelaporan masih tersentralisasi Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 35 responden terdiri 15 dari Dinas Pengelola Keuangan daerah dan sisanya 20 sampel Sekretariat Daerah, Bappeda, Rumah sakit, Dinas Kimpraswil dan Dinas Pendidikan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan instrument yang menggunakan

kuesioner kepada SKPD.

Metode Analisis Data Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau ketepatan suatu instrument, sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang realibel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal. Salah satu cara melihat normalitas yaitu dengan histogram, yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Kedua, dengan normal probability plot, yaitu distribusi normal akan membentuk satu garis

lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data akan mengikuti garis diagonalnya.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai *Tolerance*. Jika VIF > 10 dan nilai *Tolerance* < 0,10 maka terjadi gejala Multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Model regresi linier berganda adalah model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Model regresi linier berganda dilakukan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi. Persamaan regresi linier berganda yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Uji Signifikansi Parameter Individual

(Uji Statistik t) dan Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan pengujian hipotesis secara parsial digunakan Uji t. Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, dan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki hubungan signifikan/tidak dengan variabel terikat secara individual untuk setiap variabel. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian dengan kuesioner dan penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian.

Definisi Operasionalisasi Variabel

Kualitas laporan keuangan ditentukan melalui karakteristik kualitatif yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya.

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyebutkan bahwa sistem ini untuk mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Kompetensi sumber daya manusia diukur melalui persepsi responden tentang kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas yang diberikan dalam hal penyusunan laporan keuangan (Oluseyi, 2010).

Penerapan SAP maka akan menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dalam rangka untuk membentuk suatu tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikansinya dibawah 0,05. Berikut ini adalah tabel yang disajikan dalam uji validitas dan reliabilitas

Hasil Uji Reabilitas Data

Hasil uji reliabilitas instrument penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 1 berikut ini. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah jawaban responden konsisten atau tidak dengan menggunakan uji SPSS dalam menjawab setiap pernyataan.

Tabel 1
Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Data

No	Variabel	Nilai Cron-Bach	Nilai Validitas
1	Y	0,809	0.000
2	X1	0,712	0.000
3	X2	0,861	0.000

Sumber : Data Olahan, 2019.

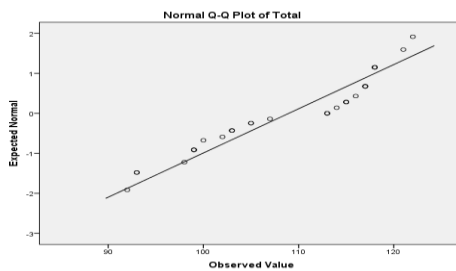
Hasil Uji Normalitas

Pada grafik normal *P-P Plot* terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas. Didalam penelitian ini disajikan dalam graifk P-Plot. Dimana dasar pengambilan keputusan yaitu:

1. Jika sumbu menyebar sekitar garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi

- normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Gambar penelitian ini untuk menunjukkan normalitas data dari suatu penelitian.

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas



Sumber : *Data Olahan, 2019.*

Hasil Uji Multikolinieritas

Pada penelitian ini, nilai tolerance yang dihasilkan dalam penelitian ini berada diantara 0.1-1.0, dan nilai VIF diantara 1.0-10. Dengan demikian dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi multikolinieritas.

Nilai dari *tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan

adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance <0,10 atau nilai VIF > 10.

Nilai yang disajikan dalam uji multikolonieritas digunakan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen memiliki kesamaan dengan variabel independen lainnya dan menghindari adanya kesamaan atas kesalahan peenggangu yang terjadi untuk masing-masing variabel independen untuk terbebas dari multikolonieritas didalam penelitian. Uji multikolonieritas digunakan untuk varians data.

Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas

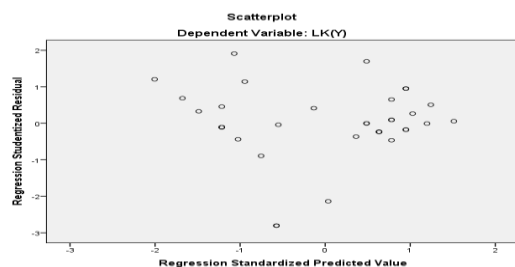
Variabel	Tolerance	VIF
X1	.638	1.568
X2	.638	1.568

Sumber : *Data Olahan, 2019.*

Hasil Uji Heterokedastisitas

Pada penelitian ini, terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y.

Gambar 3
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : *Data Olahan, 2019.*

Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi linear berganda dari model penelitian menjadi

sebagai berikut dengan menggunakan analisis variabel dalam penelitian untuk mengukur pengaruh atau tidaknya:

$$Y = 1,568 + 0,638X_1 + 0,638X_2 + e$$

- Nilai konstanta () sebesar 1,568. Artinya adalah apabila variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia diasumsikan nol (0), maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 1,568.
- Nilai koefisien regresi penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar 0,638. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,638.
- Nilai koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,638. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,638.

Hasil Pengujian Hipotesis H₁

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan didapat nilai t_{hitung} senilai 8.523. Nilai t tabel sebesar 2.037, diperoleh dari tabel statistik, dengan melihat nilai signifikansi 5% dan nilai df sebesar 32 (n -banyaknya variable independen) (Ghozali, 2013:79). Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 8.523 > t_{tabel} 2.037$. Maka dapat disimpulkan **H₁ diterima** yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, dalam hasil pengujian didapat P value

0,000 yang berarti P value $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis H₂

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan didapat nilai t_{hitung} senilai 2.950. Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 2.950 > t_{tabel} 2.037$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Maka dapat disimpulkan **H₂ diterima** yaitu kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, dalam hasil pengujian didapat P value 0,006 yang berarti P value $0,006 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa aparat pemerintah yang menerapkan standar akuntansi pemerintah akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- 2) Hasil uji hipotesis ketiga

menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi dalam menyajikan laporan keuangan akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Saran

Atas dasar kesimpulan di atas, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

Pada penelitian selanjutnya diharapkan area penelitian dapat diperluas, tidak hanya pada beberapa SKPD, namun dapat menambahkan SKPD lainnya yang berada di Kabupaten, sehingga lebih dapat digeneralisasikan.

Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lainnya yang memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, seperti menambahkan variabel independen atau menggunakan variabel intervening ataupun variabel moderating untuk memperoleh hasil yang berbeda. Variabel penerapan pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi dapat dijadikan rekomendasi untuk ditambahkan pada penelitian selanjutnya.

Ketika membagikan kuesioner kepada responden, sebaiknya peneliti memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan diisi, misalnya dengan cara peneliti memberikan penjelasan secara langsung ataupun menghubungi melalui telepon kepada responden, agar data yang diperoleh nantinya tidak bias dan

sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Botutihe, Tutun Hermawanto. 2013. *“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo”*. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo.
- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPPN. Yogyakarta
- Ihsanti, Emilda. 2014. *“Pengaruh Kompetensi SDM dan Penerapan SAKDaerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”*. Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.
- Indriasari, Desi, dan Ertambang Nahartyo. 2008. *“Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”*, SNA, XI. Pontianak 23- 25 Juli 2008.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Sukmaningrum, Tantriani. 2012. *“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan*

Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)". Universitas Diponegoro. Semarang.

Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Susilawati dan Dwi Seftihani Riana, 2014. "*Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*". STAR – Study & Accounting Research | Vol XI, No. 1 – 2014: 15-32.

Warisno. 2008. "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah*

Dhedy Triwardana (2017) *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar) Universitas Riau, Pekanbaru*

Nikke Yusnita Mahardini , Ade Miranti (2018). *Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Banten Tahun Anggaran 2015, Universitas Serang Raya, Serang Provinsi Jambi*". Tesis, Sekolah Pascasarjana USU. Medan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan